



SALINAN

MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS  
KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan perlindungan terhadap keamanan dan akses arsip dinamis, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu pengaturan mengenai sistem klasifikasi keamanan dan penentuan hak akses terhadap arsip dinamis Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Kementerian Luar Negeri sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi, perkembangan hukum, dan teknologi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);

6. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 514);
7. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
4. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Pencipta Arsip di lingkungannya.
5. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat, dan perorangan.
6. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
7. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan

- informasi Arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
8. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
  9. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia/lembaga pemerintahan.
  10. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.
  11. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau keselamatan bangsa.
  12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
  13. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang berkedudukan di luar negeri dan/atau dalam negeri untuk secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia pada negara penerima dan/atau pada organisasi internasional PBB dan non-PBB.
  14. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
  15. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi publik berupa penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di Kementerian dan Perwakilan.
  16. Pengguna Internal adalah pejabat dan/atau pegawai yang menggunakan Arsip dan berasal dari lingkungan Kementerian dan Perwakilan.
  17. Pengguna Eksternal adalah pihak yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar Kementerian dan Perwakilan.

## Pasal 2

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis Kementerian dan Perwakilan dimaksudkan untuk:
  - a. mendorong Unit Pengolah agar memberkaskan Arsip Dinamis secara tertib, disertai dengan daftar Arsip aktifnya;

- b. memberikan petunjuk kepada Unit Pengolah agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap Klasifikasi Keamanan dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis yang telah ditetapkan;
  - c. melindungi fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas, dan keandalan Arsip dapat tetap terjaga; dan
  - d. melindungi Arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
- (2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis Kementerian dan Perwakilan bertujuan untuk:
- a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan Arsip Dinamis;
  - b. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, biaya ringan, dan aman;
  - c. menyediakan informasi Arsip Dinamis yang dikategorikan Biasa/Terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik;
  - d. menjamin keamanan Arsip bagi informasi yang dikecualikan; dan
  - e. menciptakan kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai.

### Pasal 3

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis Kementerian dan Perwakilan mencakup:

- a. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis;
- b. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis; dan
- c. Pengamanan Arsip Dinamis.

## BAB II

### KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS

### Pasal 4

- (1) Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis Kementerian dan Perwakilan didasarkan pada kategori kerahasiaan informasi yang terdiri atas:
  - a. Sangat Rahasia;
  - b. Rahasia;
  - c. Terbatas; dan
  - d. Biasa/Terbuka.
- (2) Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dilakukan dengan ketentuan semakin tinggi tingkat kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tingkat pengamanan semakin tinggi.
- (3) Klasifikasi Akses Arsip Dinamis dilakukan dengan ketentuan semakin tinggi tingkat kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semakin ketat pengaturan akses bagi pengguna Arsip Dinamis.

#### Pasal 5

- (1) Klasifikasi Keamanan dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
  - a. Klasifikasi Keamanan dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis fasilitatif; dan
  - b. Klasifikasi Keamanan dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis substantif.
- (2) Arsip Dinamis fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Arsip dalam kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di kesekretariatan.
- (3) Arsip Dinamis substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Arsip dalam kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.
- (4) Klasifikasi Keamanan dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Klasifikasi Keamanan dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB III

#### PENGGUNA ARSIP DINAMIS

#### Pasal 6

Arsip Dinamis Kementerian dan Perwakilan dapat diakses oleh:

- a. Pengguna Internal; dan
- b. Pengguna Eksternal.

#### Pasal 7

- (1) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
  - a. Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri;
  - b. kepala Perwakilan;
  - c. pimpinan tinggi madya;
  - d. pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan kepala unit pelaksana teknis;
  - e. pejabat pengawas;
  - f. pejabat fungsional;
  - g. pengawas internal;
  - h. Arsiparis; dan
  - i. PPID.
- (2) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip Dinamis yang berada di bawah kewenangan masing-masing Pengguna Internal sesuai struktur organisasinya.
- (3) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberikan hak akses untuk Arsip Dinamis

pada Pengguna Internal Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang atas Arsip Dinamis tersebut.

- (4) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f tidak diberikan hak akses untuk Arsip Dinamis pada tingkat Pengguna Internal dengan jabatan lebih tinggi, kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang atas Arsip Dinamis tersebut.
- (5) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat mengakses seluruh Arsip Dinamis pada Pencipta Arsip Dinamis dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip Dinamis pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diberikan hak akses atas Arsip Dinamis dalam melakukan penyampaian informasi publik.

#### Pasal 8

- (1) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
  - a. publik;
  - b. pengawas eksternal; dan
  - c. aparat penegak hukum.
- (2) Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai hak untuk mengakses informasi dari Arsip Dinamis dengan tingkat kerahasiaan informasi kategori Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip Dinamis pada Pencipta Arsip untuk melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai hak untuk mengakses Arsip Dinamis pada Pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

#### Pasal 9

Pengamanan Arsip Dinamis Kementerian dan Perwakilan bertujuan untuk menjadi acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi.

Pasal 10

- (1) Pengamanan Arsip Dinamis Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan terhadap Arsip konvensional dan Arsip elektronik.
- (2) Pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Arsiparis di Unit Pengolah dan unit kearsipan.
- (3) Dalam hal belum tersedia Arsiparis pada Unit Pengolah dan unit kearsipan, pimpinan tinggi pratama dapat menugaskan pegawai pada unit kerja untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksana arsip.
- (4) Ketentuan mengenai pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1284), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2022

MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

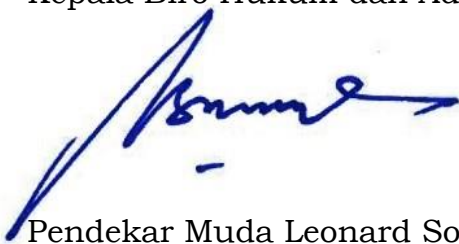
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 890

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan,



Pendekar Muda Leonard Sondakh



LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 12 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS  
 KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF  
 KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

NO. URUT	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	AKSES PENGGUNA INTERNAL	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
<b>I</b>	<b>PERENCANAAN</b>				
	<b>Penyusunan Rencana Kerja</b>				
	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	<b>Penyusunan Program Kerja Tahunan</b>				
	Usulan Unit Kerja beserta Data Pendukung	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Program Kerja Tahunan Unit Kerja	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Program Kerja Tahunan Instansi	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	<b>Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan</b>				
	Rencana Kinerja Unit Kerja	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Rencana Kinerja Instansi	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	<b>Penyusunan Perjanjian Kinerja</b>				
	<b>Penyusunan Laporan</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Laporan Mingguan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Laporan Bulanan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Laporan Triwulan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Laporan Semesteran	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi

	Laporan Tahunan Unit Kerja	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Laporan Tahunan Lembaga/Instansi	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Laporan Insidental	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
<b>Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</b>					
	Laporan Akuntabilitas Unit Kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Laporan Akuntabilitas Instansi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
<b>Evaluasi Kinerja</b>					
	Evaluasi Kinerja Unit Kerja	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Evaluasi Kinerja Kementerian	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
<b>II. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA</b>					
<b>Pengelolaan Kelembagaan</b>					
	Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Evaluasi Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	<b>Pengelolaan Ketatalaksanaan</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	<b>Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	<b>Analisis dan Evaluasi Jabatan</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
<b>III. KEUANGAN</b>					
<b>Perencanaan Anggaran</b>					
	Ketetapan pagu indikatif/pagu sementara	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi

	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA/KL)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Rencana Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah (RASKIP)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
<b>Penyusunan Anggaran</b>					
	Ketetapan pagu indikatif/pagu sementara	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Keuangan
	Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA/KL)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Keuangan
	Rincian Alokasi Anggaran	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Keuangan
	Penyusunan Pagu Definitif	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Keuangan
	Penyusunan DIPA	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Keuangan
	Penyusunan Target PNBPN	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Keuangan
	Penyusunan Ketentuan/Peraturan yang menyangkut pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban anggaran	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Keuangan
<b>Pelaksanaan Anggaran</b>					
<b>Pendapatan/Penerimaan Anggaran</b>					
	Surat Setoran Pajak (SSP)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	Buku Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja

		Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak (PBB, BPHTB, Pajak Penghasilan)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Penerimaan, Sisa Anggaran Lebih dan Saldo Kas atas pelaksanaan Dekonsentrasi	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Bunga dan /Jasa Giro	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Hutang Negara/Bantuan Luar Negeri	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Piutang Negara	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
<b>Belanja/Pengeluaran Anggaran</b>						
<b>Dokumen pelaksanaan pengadaan barang /jasa</b>						
		Barang Habis Pakai	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Barang Inventaris	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Jasa	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Dokumen pembayaran pelelangan pengadaan barang dan jasa	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Surat Perintah Kerja/Surat Pengadaan Barang/Kontrak	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Dokumen uang muka berikut data pendukungnya	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Berita Acara Penyelesaian pekerjaan, Berita Acara Serah Terima, dan Berita Acara Pembayaran	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan
		Penagihan/invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta data pendukungnya antara lain: copy faktur pajak, nota kredit dll	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja

		Bukti Pengeluaran Kas/Bank	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Surat perintah Membayar (SPM)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampirannya	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		<b>Pembukuan Anggaran yaitu:</b>				
		Buku Kas Umum (BKU)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Buku Kas Pembantu (BKP)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Rekening Koran Bank	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Buku Pajak	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Buku-buku/kartu pembantu bendaharawan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Daftar/Kartu Gaji	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Keuangan
		Berita Acara Pemeriksaan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Kas/ Register Penutupan Kas	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Penggunaan dana pemerintah untuk kontribusi/ iuran pada Badan / Organisasi Internasional	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja

		Verifikasi Anggaran (Nota Hasil Verifikasi (NHV) dan Jawaban Nota Hasil Verifikasi (JNHV))	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Keuangan
		Beban Pusat Persekot Resmi (BPPR)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Keuangan
		Beban Pusat Perjalanan Dinas (BP Jaldis)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Keuangan
<b>Bantuan Luar Negeri</b>						
		Permohonan Pinjaman Luar Negeri (Blue Book)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Dokumen Kesanggupan negara donor membiayai (Grey Book)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dan sejenisnya	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Dokumen Loan Agreement: draft agreement, legal opinion, surat menyurat, tender, dsb	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Alokasi dan Relokasi penggunaan dana luar negeri, antara lain usulan luncuran dana	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Aplikasi penarikan dan Bantuan Luar Negeri (BLN)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Otorisasi Penarikan Dana ( <i>payment advice</i> )	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Bagian Keuangan
		Realisasi pencairan dana bantuan luar negeri	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Bagian Keuangan
		Permintaan penarikan dana dari negara donor	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Bagian Keuangan
		<i>Staff Appraisal Report</i>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Bagian Keuangan

		Laporan Hutang Negara	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Bagian Keuangan
		Ketentuan/peraturan yang menyangkut bantuan/pinjaman luar negeri	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Bagian Keuangan
<b>Pengelolaan APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)</b>						
<b>Keputusan Pengguna Anggaran, tentang penetapan:</b>						
		Kuasa Pengguna Anggaran	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Kuasa Pengguna Barang/Jasa	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Pejabat Pembuat Komitmen	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Pejabat Pembuat Daftar Gaji	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Pejabat Penandatangan SPM	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Bendahara Penerimaan/Pengeluaran	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Pengelola Barang	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Pejabat /Panitia Pengadaan (termasuk berita acara serah terima jabatan)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
<b>Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah</b>						
		Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Berita Acara Rekonsiliasi	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Daftar Transaksi (DT), Pengeluaran (PK), Penerimaan (PN), Dokumen Sumber (DS), Buku Jurnal (BJ), Surat Tanda Setor (STS), Surat Setoran Bukan Pjaka (SSBP), Giro 5 atau Giro 8, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SPM dalam daftar ringkasan pengembalian dan potongan dari pengeluaran (SPDR)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja

		Memo Penyesuaian (MP)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Listing (daftar rekaman penerimaan) buku temuan dan tindakan lain (SAI)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Laporan realisasi bulanan SAI (Sistem Akutansi Instansi)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Laporan realisasi triwulan SAI dari Unit Akuntansi wilayah/Unit Akuntansi kantor Pusat	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Laporan realisasi Anggaran dan Neraca bulanan/triwulan/semesteran	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Laporan realisasi Anggaran Neraca Tahunan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Laporan Keuangan K/L Tahunan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
<b>Pertanggung Jawaban Keuangan Negara</b>						
<b>Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional:</b>						
		LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum	Inpektorat Jenderal
		MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inpektorat Jenderal
		Tindak lanjut/Tanggapan LHP	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inpektorat Jenderal
<b>Dokumen Penyelesaian Keuangan Negara:</b>						
		Tuntutan Perbendaharaan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
		Tuntutan Ganti Rugi	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
<b>Akuntansi dan Pelaporan Keuangan</b>						
		Laporan Keadaan Kas	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja



	Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Kebijakan Akuntansi, Catatan atas laporan keuangan termasuk arsip data komputer	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	Laporan Pendapatan Negara	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Keuangan
	Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan, Triwulan, Semesteran	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Keuangan
	Laporan Keuangan Tahunan/Laporan Nihil:	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	Laporan Perkembangan realisasi penerimaan, realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	Laporan Realisasi Pendapatan Negara dari masing-masing Satuan Kerja	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	<b>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Bagian Keuangan
<b>IV. KEPEGAWAIAN</b>					
	<b>Penyusunan Formasi</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	<b>Pengadaan Pegawai</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	<b>Pengembangan Pegawai</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	<b>Penilaian Kinerja Pegawai</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia

	Pelatihan Kerja/Magang	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Tugas Belajar	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
<b>Pengelolaan Kenaikan Pangkat/Golongan dan Jabatan Fungsional</b>					
	Kenaikan Pangkat Reguler	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Kenaikan Pangkat Pilihan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Ujian Dinas	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Ujian Penyesuaian	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Ujian Kompetensi/Sertifikasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
<b>Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan</b>					
	Pengangkatan Jabatan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Pemberhentian Jabatan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	<b>Mutasi Pegawai</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
<b>Pembinaan Jabatan Fungsional</b>					
	Jabatan Fungsional Diplomat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
	Jabatan Fungsional Penata Informasi Diplomatik	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

	Jabatan Fungsional Penata Kanselerai	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
	Jabatan Fungsional Auditor	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
	Jabatan Fungsional Arsiparis	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
	Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
	Jabatan Fungsional Perencana	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
	Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
	Jabatan Fungsional Pustakawan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
	Jabatan Fungsional Lainnya	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
<b>Pembinaan Pegawai</b>					
	Penghargaan dan Tanda Jasa Pegawai	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Sengketa Kepegawaian	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Hukuman Disiplin	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
<b>Administrasi Pegawai</b>					
	Mutasi Keluarga	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia

	Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Data/Keterangan Pegawai /Presensi	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Kartu Pegawai	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Kartu Taspen	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Kartu Jaminan Kesehatan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Cuti Pegawai	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
<b>Kesejahteraan Pegawai</b>					
	Tunjangan Jabatan dan Kinerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Bantuan Biaya Pendidikan Anak <i>Home Staff</i> di Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Perumahan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum
	Pembekalan Pensiun	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Pengurusan Jenazah	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
<b>Pemberhentian Pegawai</b>					

	Dengan Hormat	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Tidak Dengan Hormat	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
<b>Pengelolaan Organisasi Non Kedinasan</b>					
	KORPRI	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Dharma Wanita	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Koperasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Yayasan Upakara	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Organisasi Non Kedinasan lainnya	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
<b>Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi</b>					
	Tingkat Madya	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Tingkat Pratama	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	<b>Pengelolaan Personal File</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
<b>V. PERLENGKAPAN</b>					
<b>Pengadaan Barang dan Jasa</b>					
	Alat Tulis Kantor	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	Perlengkapan Kantor	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	Kendaraan Dinas	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja

	Instalasi/Jaringan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum
	Tanah	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum
	Bangunan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum
	Peralatan Mesin dan Listrik	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum
	Aset Tak Berwujud (ATB)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum
<b>Penggunaan Fasilitas Kantor</b>					
	Perlengkapan Kantor	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	Kendaraan Dinas	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	Ruangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum
	Sarana Telekomunikasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum
	Tanah dan Bangunan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum
	<b>Pengelolaan Dokumentasi dan Penataan Aset Tanah dan Bangunan</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum
<b>Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Kementerian</b>					
	Personal	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum
	Lingkungan Kantor	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum
<b>Pengelolaan Barang Milik Negara</b>					

	Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum
	Pengelolaan Data Barang Milik Negara	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum
	Pengurusan Hibah Barang Milik Negara	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum
	Penghapusan Barang Milik Negara	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum
	Pelaporan Barang Milik Negara	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum
<b>Pemeliharaan</b>					
	Gedung dan Rumah Dinas	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum
	Peralatan Kantor	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	Kendaraan Dinas	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	Peralatan Mesin dan Listrik	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum
	Urusan dalam Perkantoran	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum
<b>Layanan Pengadaan</b>					
	Layanan Lelang Konstruksi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum
	Layanan Lelang Barang dan Seleksi Konsultan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum

	Layanan Lelang Barang Jasa lainnya	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum
	Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Pengadaan Jasa Pemerintah	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum
<b>VI. KEHUMASAN</b>					
<b>Hubungan Kerja Antar Lembaga</b>					
	Hubungan Politik, Hukum dan Keamanan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
	Hubungan Perekonomian	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
	Hubungan Sosial dan Budaya	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
	Pemilihan Umum di Luar Negeri	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum
<b>Penghimpunan Dukungan Substansi Program Dalam Negeri</b>					
	Program Tamu Asing dan Program Parlemen	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
	Pemangku Kepentingan Non Pemerintah	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
	Program Antar Kementerian dan Lembaga	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
	Isu-isu Khusus Dalam Negeri	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
<b>Penghimpunan Dukungan Substansi Program Luar Negeri</b>					
	Program dengan Mitra Kerja	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
	Program dengan Organisasi Internasional	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
	Program dengan Organisasi Regional	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan



	Isu-isu khusus Luar Negeri	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
	<b>Hubungan Media dan Juru Bicara</b> Hubungan Media Massa dengan Juru Bicara	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
	Hubungan Strategis Pemanfaatan Diplomasi Digital	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
	Dukungan Substantif Kejubiran	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
	<b>Keprotokolan</b> Penyelenggaraan Kesekretariatan dan Korespondensi Pimpinan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
	Penyelenggaraan Kegiatan Menteri dan Wakil Menteri	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
	<b>Dengar Pendapat/ Hearing DPR</b>	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan /atau ketertiban umum	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
	<b>Dokumentasi dan Penerbitan</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
	<b>Pameran/Sayembara/Lomba, Festival, Pembuatan Spanduk, dan Iklan</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	<b>Penghargaan/tanda kenang-kenangan</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
	<b>Pemberian Ucapan</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
	<b>VII. HUKUM</b>				
	<b>Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan
	<b>Pemberian Pertimbangan Hukum</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan

	<b>Pengkajian Produk Hukum</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan
	<b>Pelayanan Advokasi Hukum</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan
	<b>Sosialisasi Produk Hukum</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan
<b>VIII. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>					
<b>Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan</b>					
<b>Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan</b>					
	Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
<b>Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</b>					
	Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	Pendidikan dan Pelatihan Non Diplomatik	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	<b>Pelaksanaan Kerja Sama Lembaga Diklat</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	<b>Monitoring dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
<b>IX. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>					
	<b>Penyusunan Rencana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	PUSTIK KP
	<b>Perencanaan Strategi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	PUSTIK KP

	<b>Pembinaan Kepatuhan terhadap Kebijakan SPBE</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	PUSTIK KP
	<b>Pengelolaan Manajemen Pengetahuan SPBE</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	PUSTIK KP
	<b>Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SPBE</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	PUSTIK KP
	<b>Layanan Pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	PUSTIK KP
	<b>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	PUSTIK KP
<b>X. KEARSIPAN</b>					
	<b>Pengendalian dan Pengurusan Surat</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan
	<b>Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Tata Kelola Persuratan</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan
	<b>Penyusunan Instrumen Kearsipan</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan
<b>Penyusutan</b>					
	Pemindahan Arsip	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan
	Pemusnahan Arsip	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan
	Penyerahan Arsip Statis	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan
	<b>Layanan Peminjaman Arsip</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan
<b>Pembinaan Kearsipan</b>					
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kearsipan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan

	Monitoring dan Evaluasi Kearsipan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan
<b>Pengawasan Kearsipan</b>					
<b>XI. PERPUSTAKAAN</b>					
	Pengadaan Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
	Pengelolaan Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
	Perawatan Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
	Kerja Sama Perpustakaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
	Layanan Perpustakaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
<b>XII. PENGAWASAN</b>					
<b>Rencana Program Pengawasan</b>					
	Rencana Strategis Pengawasan	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum	Inspektorat Jenderal
	Rencana Program Pengawasan Usulan Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (UPKPT), Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektorat Jenderal
	Rencana Kinerja Pengawasan, Penetapan Kinerja Pengawasan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektorat Jenderal
<b>Audit</b>					
	Audit keuangan	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum	Inspektorat Jenderal
	Audit Kinerja	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum	Inspektorat Jenderal
	Audit Kebijakan	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum	Inspektorat Jenderal
	Probity Audit	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum	Inspektorat Jenderal
	Audit Berbasis Resiko	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum	Inspektorat Jenderal

	Audit dengan Tujuan Tertentu	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum	Inspektorat Jenderal
<b>Reviu</b>					
	Reviu Laporan Keuangan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektorat Jenderal
	Reviu RKA-KL	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektorat Jenderal
	Reviu Lainnya berupa: reviu laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), BMN, Revisi Anggaran, Aspek Keuangan Tertentu, Aspek Kinerja Tertentu, Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, dan Hasil Kajian Pengawasan tertentu baik semesteran dan tahunan meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektorat Jenderal
<b>Evaluasi</b>					
	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektorat Jenderal
	Evaluasi Reformasi dan Birokrasi (RB)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektorat Jenderal
	Evaluasi Program Lainnya	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektorat Jenderal
<b>Pemantauan/Monitoring</b>					
	Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/Program	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektorat Jenderal
	Pemantauan Lainnya	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektorat Jenderal
	<b>Pengaduan Masyarakat</b>	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum	Inspektorat Jenderal
<b>Laporan Hasil Pengawasan</b>					
	Ikhtisar Hasil Pengawasan (IHPS) berupa : Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik yang disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPK maupun BPKP serta tanggapan atas Laporan Hasil Pengawasan BPK mencakup Tindak Lanjut atas Laporan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektorat Jenderal
	<b>Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)</b> seperti : a. Laporan Kehilangan; b. Berita Acara Kehilangan Barang/ Uang; c. Surat Keputusan Tanggung Jawab Mutlak (Surat Kesanggupan untuk mengganti ke Kas Negara, Surat Keputusan Penghapusan uang dan barang sampai dengan Laporan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi).	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum	Inspektorat Jenderal
<b>Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (LHP)</b>					
	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum	Inspektorat Jenderal
	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan BPKP	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum	Inspektorat Jenderal

	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum	Inspektorat Jenderal
<b>Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</b>					
	Pengendalian Gratifikasi	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektorat Jenderal
	Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektorat Jenderal
<b>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</b>					
	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Inspektorat Jenderal
	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektorat Jenderal
<b>Kegiatan Pengawasan Lainnya</b>					
	Konsultasi dan Asistensi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Inspektorat Jenderal
	Sosialisasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Inspektorat Jenderal
	Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas)/Rapat Koordinasi Pengawas (Rakorwas)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektorat Jenderal
	Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektorat Jenderal
	Sistem Informasi/Aplikasi Pengawasan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektorat Jenderal
	Kapabilitas APiP (Internal Audit Capability Model - IACM)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektorat Jenderal

MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 12 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS  
 KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF  
 KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

NO. URUT	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	AKSES PENGGUNA INTERNAL	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2				
I.	<b>HUBUNGAN BILATERAL DAN INTRAKAWASAN DAN ANTAR KAWASAN</b>				
1	<b>Perumusan Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri</b>				
	- Usulan rumusan kebijakan;	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan
	- Penyiapan Kebijakan;	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan
	- Perumusan dan Penyusunan Bahan;	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan
	- Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan;	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan
	- Penetapan dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria.	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan
2	<b>Perundingan Kerja Sama Bilateral di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika</b>				
	a Penyiapan bahan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan

		b	Pencalonan dan Penetapan Delegasi RI (Delri)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan	
		c	Laporan pra perundingan Internasional dan hasil rapat koordinasi	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan	
		d	Perjanjian Kerja Sama dan Laporan Hasil Perundingan meliputi : <i>Memorandum of Understanding (MoU), Letter of intent (LoI), Joint Communiqué, Minutes of Meeting, Agreed Minutes, Record of Discussion, Wrap-up Discussion, Joint Statement, Joint Declaration dan Agreement sejenis lainnya</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan	
		e	Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan	
	<b>3</b>	<b>Perundingan Kerja Sama Intra Kawasan dan Antar Kawasan Asia Pasifik dan Afrika</b>						
		a	Asia Pasifik					
			Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security, Asian Parliamentary Assembly (APA), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), Asia-Pacific Parliamentarians on Environment and Development (APPCED), IORA, Asia Middle East Dialogue (AMED), Gulf Cooperation Council (GCC), Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA), Asia Cooperation Dialogue (ACD), Heart of Borneo (HoB), Shanghai Cooperation Organization (SCO), Boao Forum for Asia, South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), Central Asia Cooperation Organization (CACO), Economic Cooperation Organization (ECO), Initiative for Development in East Asia (IDEA), Australia-Indonesia Development Assistance (AIDA), Joint Policy Committee Indonesia-Northern Territory dan Forum kerja sama lainnya di kawasan Asia Pasifik.	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Ditjen Asia Pasifik dan Afrika / Perwakilan	
		b	Afrika					
			New Asian-African Strategic Partnerships (NAASP), Uni Afrika, Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), Economic Community of West African States (ECOWAS), Southern African Development Community (SADC), East Africa Community (EAC), Southern African Customs Union (SACU), Economic Community of Central African States (ECCAS), Central African Economic and Monetary Community (CEMAC), West African Economic and Monetary Union, Intergovernmental Authority on Development, Liga Arab, Asia Middle East Dialogue (AMED), Gulf Cooperation Council (GCC), Arab Maghreb Union, dan Forum kerja sama lainnya di kawasan Afrika.	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Ditjen Asia Pasifik dan Afrika / Perwakilan	
	<b>4</b>	<b>Perundingan Kerja Sama Bilateral di Kawasan Amerika dan Eropa</b>						



	a	Penyiapan bahan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Ditjen Amerika dan Eropa / Perwakilan	
	b	Pencalonan dan Penetapan Delegasi RI (Delri)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Ditjen Amerika dan Eropa / Perwakilan	
	c	Laporan pra perundingan Internasional dan hasil rapat koordinasi	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Ditjen Amerika dan Eropa / Perwakilan	
	d	Perjanjian Kerja Sama dan Laporan Hasil Perundingan meliputi : <i>Memorandum of Understanding (MoU), Letter of intent (LoI), Joint Communiqué, Minutes of Meeting, Agreed Minutes, Record of Discussion, Wrap-up Discussion, Joint Statement, Joint Declaration dan Agreement sejenis lainnya</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Ditjen Amerika dan Eropa / Perwakilan	
	e	Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Ditjen Amerika dan Eropa / Perwakilan	
	<b>5</b>	<b>Perundingan Kerja Sama Intra Kawasan dan Antar Kawasan Amerika dan Eropa</b>					
	a	Amerika					
		<i>Energy Charter, FEALAC, Pacific Alliance, ALBA, UNASUR, MERCOSUR, OAS, CARICOM, SICA, ALADI, PARLACEN, CELAC, NAFTA, MIKTA, Community of Democracies, OECD, Arctic Council, Antarctic Treaty System, NATO, GUAM, dan Organisasi Kerja sama lainnya di kawasan Amerika</i>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Ditjen Amerika dan Eropa / Perwakilan	
	b	Eropa					
		<i>Uni Eropa, ASEM, Energy Charter, CERN, Energy Community, Eureka, European Science and Technology, COST, EFTA, Community of Democracies, OECD, Council of Europe, AER, NORDIC Council, Council of Baltic States, CIS, Commonwealth of Nations, CPLP, OIF, Arctic Council, Antarctic Treaty System, CSTO, OSCE, AITIC, Eurasian Economic Union, Union for the Mediterranean dan Organisasi Kerja sama lainnya di kawasan Eropa.</i>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Ditjen Amerika dan Eropa / Perwakilan	
	<b>6</b>	<b>Laporan Penyelenggaraan Promosi Terpadu, Misi Bisnis, Misi Budaya dan Kegiatan Sejenis Lainnya</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan	

	<b>7</b>	<b>Isu dan Laporan Khusus</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan
	<b>8</b>	<b>Pemberian Panduan Substantif dan</b>				
		a. Kertas Kerja	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan
		b. Laporan Diseminasi Hasil Perundingan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan
	<b>9</b>	<b>Laporan Monitoring dan Evaluasi</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan
<b>II. KERJA SAMA ASEAN</b>						
	<b>1</b>	<b>Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN</b>				
		a. Kerja Sama Politik dan Keamanan				
		1 Kawasan Netral, Bebas dan Damai ( <i>Zone of Peace, Freedom and Neutrality/ZOPFAN</i> ); Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara ( <i>South East Asia Nuclear Weapon Free Zone/SEAN WFZ</i> ); Kerja Sama Persahabatan/ <i>Treaty of Amity Cooperation (TAC)</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN/ Perwakilan
		2 Pertemuan Direktorat Jenderal ASEAN ( <i>ASEAN Director General/ASEAN DGs</i> ), <i>Committee of Permanent Representatives (CPR)</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN/ Perwakilan
		3 Analisis Politik dan Koordinasi <i>Senior Officials Meeting (SOM)</i> ; <i>ASEAN Standing Committee (ASC)</i> ; <i>Post Ministerial Conference (PMC)</i> , <i>ASEAN Ministerial Meetings (AMM)</i> ; <i>Joint Consultative Meeting (JCM)</i> dan KTT ASEAN (Kesatuan ASEAN)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN/ Perwakilan
		4 Laut China Selatan	Sangat Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau keselamatan bangsa	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN/ Perwakilan

			5	Penunjukan Duta Besar Asing untuk ASEAN	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN/ Perwakilan
			6	Keanggotaan Timor Leste di ASEAN	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN/ Perwakilan
			7	<i>ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN/ Perwakilan
			8	<i>Women, Peace and Security</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN/ Perwakilan
			9	<i>ASEAN Outlook on the Indo Pacific</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN/ Perwakilan
			10	<i>Developments in Myanmar</i>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN/ Perwakilan
			11	<i>ASEAN Defence Ministerial</i>				
			a)	Pemberantasan Terorisme	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN/ Perwakilan
			b)	Keamanan Siber	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN/ Perwakilan

				c)	Keamanan Maritim	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN/ Perwakilan		
				d)	<i>Peacekeeping Operation</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN/ Perwakilan		
				e)	Medis Militer	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN/ Perwakilan		
				f)	Penanggulangan Ranjau Darat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN/ Perwakilan		
				12 ASEAN Ministers Meeting on							
				a)	Pemberantasan Terorisme	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan		
				b)	Kejahatan Siber	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan		
				c)	Kejahatan Ekonomi Internasional	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan		
				d)	Pencucian Uang	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan		

				e)	Penyelundupan Narkoba	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
				f)	Penyelundupan Senjata	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
				g)	Penyelundupan Perdagangan/ Ilegal Kayu dan Satwa	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
				h)	Pemberantasan Penyelundupan Manusia	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
				i)	Pemberantasan Perdagangan Manusia	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
				j)	Pemberantasan Bajak Laut	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
			13		<i>ASEAN Ministerial Meeting on Drugs Matters (AMMD)/ASEAN Senior Official on Drug Matters (ASOD)</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
			14		<i>ASEAN Maritime Forum (AMF), Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF)</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan

			15	<i>ASEAN Regional Mine Action Center (ARMAC)</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan	
			16	<i>ASEAN Coast Guards Forum (ACF)</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan	
			<b>b Kerja Sama Hukum dan Hak Asasi</b>						
			1	ASEAN Senior Law Official Meeting/ASLOM, ASEAN Law Ministerial Meeting	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan	
			2	<i>Mutual Legal Assistance</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan	
			3	<i>Extradisi</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan	
			4	<i>Privilege and Immunity</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan	
			5	<i>ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan	
			6	ASEAN Common Visa, Imigrasi dan Konsuler	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan	

		c	<b>Kerja Sama Forum, Lembaga Regional</b>				
			1 ASEAN Regional Forum (ARF)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
			2 ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
			3 ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
			4 ARF Security Policy Conference (ASPC)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
			5 Forum, Lembaga Regional dan Entitas ASEAN lainnya	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
	<b>2</b>		<b>Kerja Sama Ekonomi ASEAN</b>				
		a	<b>Investasi, Perindustrian, Perdagangan,</b>				
			1 ASEAN Economic Minister (AEM), Senior Economic Official Meeting (SEOM)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
			2 <i>Initiative for ASEAN Integration (IAI), ASEAN Single Window (ASW)</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan

			3	Perindustrian	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
			4	Investasi Perdagangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
			5	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
			6	<i>ASEAN Free Trade Area (AFTA)</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
			7	Perdagangan Bebas ASEAN dengan Mitra, <i>Free Trade Agreement/Economic Partnership, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
			8	Penyelesaian Sengketa	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
			9	Perdagangan Jasa	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan



			10	Konstruksi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
			11	Keuangan dan Perbankan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
			12	Kerja Sama Telekomunikasi dan Digital	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
			13	Perhubungan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
			14	Konektivitas ASEAN	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
			15	Pariwisata	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
			16	Bea Cukai	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan

		17	Pembangunan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
		b	Komoditi dan Sumber Daya Alam				
		1	Pertanian	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
		2	Kehutanan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
		3	Perkebunan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
		4	Energi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
		5	Perikanan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
		6	Pemanfaatan Mineral dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
		c	Kerja Sama Subkawasan				

			1	Subkawasan <i>Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
			2	Subkawasan <i>Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines-East ASEAN Growth Triangle (BIMP-EAGA)</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
			3	Subkawasan ASEAN lainnya	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
	<b>3</b>	<b>Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN</b>						
		<b>a</b>	Kerja Sama Bidang Sosial					
			1	Perempuan dan Anak	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
			2	Pemuda	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
			3	Olahraga	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
			4	Yayasan ASEAN/ASEAN Foundation	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan

			5	Aparatur Sipil Negara	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
			6	Sosial	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
			7	Pembangunan Pedesaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
			8	Pengentasan Kemiskinan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
			9	Kependudukan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
			10	Kesehatan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
			11	Pelayanan Masyarakat dan Tenaga Kerja Migran	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
		b	Kerja Sama Bidang Kebudayaan dan					

			1	Penerangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
			2	Kebudayaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
			3	Pendidikan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
			4	Pusat Studi ASEAN (PSA)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
			5	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
			6	Lingkungan Hidup	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
			7	Penanggulangan Bencana dan Bantuan Kemanusiaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
	<b>4</b>	<b>Kerja Sama Eksternal ASEAN</b>						
		a	Kerja Sama Eksternal dengan Asia					

			1	ASEAN - RRT	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
			2	ASEAN - Jepang	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
			3	ASEAN - Republik Korea (ROK)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
			4	ASEAN - Republik Demokratik Rakyat Korea (RDRK)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
			5	Negara lainnya di Kawasan Asia Timur	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
			<b>b</b>	<b>Asia Selatan, Afrika dan Pasifik</b>				
			1	ASEAN-Australia	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
			2	ASEAN- India	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan

			3	ASEAN - Selandia Baru	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
			4	ASEAN - Pakistan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
			5	ASEAN - Bangladesh	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
			6	ASEAN - Fiji	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
			7	ASEAN - Maroko	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
			8	ASEAN - Mesir	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
			9	ASEAN - Sri Lanka	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
			10	Negara lainnya di Kawasan Asia Selatan, Afrika dan Pasifik	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan

		c	Amerika, Eropa dan Kawasan Lainnya				
		1	ASEAN - Amerika Serikat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
		2	ASEAN - Kanada	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
		3	ASEAN - Uni Eropa	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
		4	ASEAN - Rusia	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
		5	ASEAN - Norwegia	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
		6	ASEAN- Swiss	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
		7	ASEAN - Jerman	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan



			8	ASEAN - Turki	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
			9	Negara lainnya di Kawasan Amerika dan Eropa	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
		d	Kerja Sama Eksternal dengan					
			1	ASEAN Plus Three (APT)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
			2	East Asia Summit (EAS)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
			3	ASEAN - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
			4	ASEAN - <i>Economic Cooperation Organization</i> (ECO), ASEAN - <i>Gulf Cooperation Council</i> (GCC), ASEAN - <i>Merado Comun del Sur/Common Market of the South</i> (MERCOSUR), ASEAN - <i>South Asia Association for Regional Cooperation</i> (SAARC), ASEAN - <i>Community of Latin American and Caribbean States</i> (CELAC), ASEAN - <i>Pacific Alliance</i> (PA)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
			5	Organisasi Regional dan Internasional lainnya	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
<b>III.</b>	<b>PENANGANAN ISU INTERNASIONAL</b>							

	1	<b>Arsip yang berkaitan dengan saling dukung pencalonan antara RI dengan negara sahabat pada Organisasi Internasional</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Setditjen Kerja Sama Multilateral / Perwakilan
	2	<b>Lowongan Bekerja pada Organisasi Internasional</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Setditjen Kerja Sama Multilateral / Perwakilan
	3	<b>Keamanan Internasional dan Perlucutan</b>				
		a. Keamanan Internasional	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata / Perwakilan
		- Konflik antar - internal negara				
		- Pasukan Pemeliharaan				
		- Kelembagaan Keamanan				
		b. Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata / Perwakilan
		- Senjata Nuklir				
		- Senjata Kimia				
		- Senjata Biologi				
		- Senjata Konvensional				
		c. Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata / Perwakilan
		- Perdagangan Manusia				
		- Penyelundupan Manusia ( <i>people</i> )				
		- Bali Process				
		- Narkoba				
		- UNCAC ( <i>United National</i> )				
		- <i>Wild Life Crime</i> ( <i>Kejahatan</i> )				
		- IACA ( <i>International Anti</i> )				
		- CCPCJ ( <i>Commission on Crime</i> )				
		- UNODC ( <i>United National</i> )				
		d. Penanggulangan Terorisme	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata / Perwakilan
		- Kerja Sama Penanggulangan Terorisme dalam Kerangka PBB				
		- Kerja Sama Penanggulangan Terorisme di luar Kerangka PBB				
		- Kerja Sama Kelembagaan dan Pengembangan Kapasitas				

		e.	Keamanan Siber	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata / Perwakilan
	<b>4</b>	<b>Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan</b>					
		a.	Hak-hak sipil dan politik	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Hak Azasi Manusia & Kemanusiaan / Perwakilan
			- Pemajuan hak-hak sipil dan politik				
			- Perlindungan hak-hak sipil dan politik				
			- Mekanisme hak-hak sipil dan politik				
		b.	Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan pembangunan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Hak Azasi Manusia & Kemanusiaan / Perwakilan
			- Pemajuan hak-hak ekonomi,				
			- Perlindungan hak-hak ekonomi,				
			- Mekanisme hak-hak ekonomi,				
		c.	Hak-hak kelompok rentan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Hak Azasi Manusia & Kemanusiaan / Perwakilan
			- Hak Perempuan				
			- Hak Anak				
			- Hak Pekerja Migran				
			- Hak-hak kelompok minoritas dan				
		d.	Kemanusiaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Hak Azasi Manusia & Kemanusiaan / Perwakilan
			- Humaniter				
			- Lembaga Bantuan Kemanusiaan				
			- Penanganan Pengungsi dan				
			- Dampak Kemanusiaan Konflik				
	<b>5</b>	<b>Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup</b>					
		a.	Ekonomi dan Keuangan internasional	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup / Perwakilan
			- Organisasi Pembangunan Ekonomi PBB				
			- Lembaga Keuangan Internasional				

			-	Pembangunan Ekonomi Badan-badan Regional PBB				
			-	Administrasi, Anggaran dan koordinasi				
		b.		Pembangunan berkelanjutan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup / Perwakilan
			-	Pembangunan Berkelanjutan Global				
			-	Pengurangan Kemiskinan				
			-	Pembiayaan Pembangunan				
			-	Kegiatan Operasional PBB				
		c.		Pembangunan Sektoral	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup / Perwakilan
			-	Kerja sama Teknologi Informasi dan Komunikasi				
			-	Kerja Sama Infrastruktur dan Komunikasi				
			-	Energy dan Sumber daya Mineral				
			-	sumber daya kelautan dan kehutanan				
		d.		Lingkungan Hidup	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup / Perwakilan
			-	Lingkungan Hidup dan pemukiman				
			-	Perubahan Iklim				
			-	Keanekaragaman Hayati				
			-	Pendanaan Global Program Lingkungan Hidup				
		e.		Kehutanan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup / Perwakilan
		f.		Kelautan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup / Perwakilan
<b>6</b>	<b>Perdagangan, Perindustrian, Komoditas dan Kekayaan Intelektual</b>							

		a.	Perdagangan Barang, Pengembangan Industri dan Investasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Perdagangan Perindustrian Komoditas dan Kekayaan Intelektual/ Perwakilan	
			- Perdagangan barang <u>nonpertanian</u>					
			- Kerja Sama pengembangan <u>industri</u>					
			- <u>Kawasan perdagangan bebas</u>					
			- Kerja sama investasi dan isu-isu baru <u>World Trade Organization</u>					
			- Kerja sama pengembangan <u>ekonomi kreatif</u>					
			- Kerja sama pengembangan <u>ekonomi digital</u>					
		b.	Perdagangan Jasa dan Fasilitas Perdagangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Perdagangan Perindustrian Komoditas dan Kekayaan Intelektual/ Perwakilan	
			- Perdagangan Jasa dan <u>E-Commerce</u>					
			- <u>Kerja Sama Perdagangan</u>					
			- <u>Akses World Trade Organization</u>					
			- Fasilitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kelembagaan dan <u>Peningkatan kapasitas</u>					
		c.	Pertanian dan Komoditi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Perdagangan Perindustrian Komoditas dan Kekayaan Intelektual/ Perwakilan	
			- <u>Pertanian</u>					
			- Komoditi Pangan dan <u>Perkebunan</u>					
			- Komoditi Kehutanan dan <u>Pertambangan</u>					
			- Komoditi Kelautan dan Dana Bersama Komoditi					
		d.	Standarisasi, Hak Kekayaan Intelektual dan Penyelesaian Sengketa	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Perdagangan Perindustrian Komoditas dan Kekayaan Intelektual/ Perwakilan	
			- Standardisasi Barang dan Jasa					
			- Penyelesaian Sengketa dan <u>Pengamanan Perdagangan</u>					
			- Penanganan Hambatan Teknis <u>Perdagangan</u>					
			- <u>Hak Kekayaan Intelektual</u>					
		<b>7</b>	<b>Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang</b>					
		a.	Pembangunan Sosial, Badan-badan Khusus PBB dan Isu-isu Terkini	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang / Perwakilan	
			- <u>Pembangunan Sosial</u>					
			- <u>Badan-badan Khusus PBB</u>					
			- <u>Demokratisasi dan Tata Pemerintahan</u>					
			- <u>Isu-isu Sains dan Teknologi</u>					

		b.	Sosial Budaya dan Lembaga Non Pemerintah	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang / Perwakilan
			- Kesehatan Global				
			- Pendidikan, Kebudayaan dan Kepariwisata				
			- Ketenagakerjaan Internasional				
			- Lembaga antar negara dan Organisasi Internasional Non Pemerintah				
		c.	Organisasi Internasional Negara Berkembang I	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang / Perwakilan
			- Politik Organisasi Konferensi Islam				
			- Ekonomi, Sosial dan budaya Organisasi Konferensi Islam				
			- Politik Gerakan Non-Blok				
			- Ekonomi, Sosial dan Budaya Gerakan Non-Blok				
		d.	Organisasi Internasional Negara Berkembang II	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang / Perwakilan
			- Kelompok-77				
			- Kelompok -15				
			- Kelompok D-8				
			- Kerja Sama Selatan-selatan				
	<b>8</b>	<b>Keanggotaan Organisasi Internasional</b>		Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan
	<b>9</b>	<b>Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (SMU PBB)</b>		Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan

	10	<b>Bencana Global</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan	
		a	Bencana Alam				
		b	Pandemi				
		<b>IV. HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL</b>					
	1	<b>Perumusan Norma Hukum Nasional dan Perjanjian Internasional</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional / Perwakilan	
	2	<b>Perjanjian Internasional meliputi pembuatan, pengelolaan, pelaksanaan, dan penyelesaian</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional / Perwakilan	
		-	Perjanjian Internasional di bidang Politik dan Keamanan				
		-	Perjanjian Internasional di bidang Kewilayahan				
		-	Perjanjian Internasional di bidang Kelautan				
		-	Perjanjian Internasional di bidang Perdagangan, Jasa Ekonomi, Investasi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup				
		-	Perjanjian Internasional di bidang Kerjasama Teknik, Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Ketenagakerjaan				
		-	Dokumen Penyelesaian Sengketa				
		-	<i>Full Powers</i>				
	3	<b>Advokasi Hukum dan Perjanjian Internasional</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional / Perwakilan	
	4	<b>Publikasi dan sosialisasi perjanjian internasional</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional / Perwakilan	
	5	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional / Perwakilan	
		<b>V. INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK</b>					

	1	<b>Berkas penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup diplomasi publik</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Diplomasi Publik / Perwakilan
		- Bidang Politik				
		- Bidang Keamanan				
	2	<b>Berkas penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup diplomasi publik</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Diplomasi Publik / Perwakilan
		- Bidang Ekonomi				
		- Bidang Pembangunan				
	3	<b>Berkas penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup diplomasi publik di bidang :</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Diplomasi Publik / Perwakilan
		- Bidang Sosial				
		- Bidang Budaya				
	4	<b>Berkas Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup diplomasi publik dan isu-isu aktual dan strategis</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Diplomasi Publik / Perwakilan
		- Strategis Kewilayahan				
		- Strategis Lokal				
	5	<b>Berkas Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup diplomasi publik, pemberdayaan masyarakat Indonesia di Luar Negeri</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Diplomasi Publik / Perwakilan
		- Ekonomi				
		- Inovasi dan teknologi				
		- Sosial Budaya				
		- Pendidikan				
		- Filantropi				
	6	<b>Berkas Penyelenggaraan Museum Konferensi Asia Afrika</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Museum Konferensi Asia-Afrika / Perwakilan
		- Publikasi dan Promosi Nilai-Nilai				
		- Pelestarian dan Dokumentasi Diplomasi				
	7	<b>Kerja Sama Pembangunan Internasional</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Dit Kerja Sama Pembangunan Internasional / Perwakilan
		Penyelenggaraan hubungan luar negeri				
		- Wilayah Asia dan Pasifik				
		- Wilayah Amerika dan Eropa				
		- Wilayah Afrika dan Timur Tengah				



		- Organisasi Internasional				
<b>8</b>	<b>Pemberitaan</b>					
	a	Kebijakan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup pengelolaan informasi terkait pembuatan berita	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Informasi dan Media / Perwakilan
	b	Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup pengelolaan informasi di bidang :	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Informasi dan Media / Perwakilan
		1	Liputan Berita, Media Massa dan			
		2	Transkripsi			
		3	Dokumentasi Kegiatan			
		4	Publikasi			
		5	Pemanfaatan Multimedia dan Media Sosial			
		6	Monitoring Berita Media Asing dan Nasional			
<b>9</b>	<b>Berkas fasilitasi media masa dalam</b>					
	a	Akreditasi Wartawan Asing	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Informasi dan Media / Perwakilan
	b	Kerja Sama dengan Media	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Informasi dan Media / Perwakilan
	c	Layanan Wartawan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Informasi dan Media / Perwakilan
<b>10</b>	<b>Berkas mengenai Pelayanan Informasi Publik</b>		Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Informasi dan Media / Perwakilan
<b>VI.</b>	<b>KEAMANAN DIPLOMATIK</b>					
	<b>1</b>	<b>Berkas Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup keamanan diplomatik</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Dit Keamanan Diplomatik / Perwakilan
	a	Pengamanan Fisik				
	b	Pengamanan Informasi				
	c	Pengamanan Personel				

	<b>2</b>	<b>Berkas Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kerja sama keamanan diplomatik</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Dit Keamanan Diplomatik / Perwakilan
		a Kerja Sama Pengamanan Dalam Negeri				
		b Kerja Sama Pengamanan Luar Negeri				
	<b>3</b>	<b>Berkas perizinan organisasi kemasyarakatan asing</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Dit Keamanan Diplomatik / Perwakilan
	<b>4</b>	<b>Berkas evaluasi Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Dit Keamanan Diplomatik / Perwakilan
<b>VII. PROTOKOL DAN KONSULER</b>						
	<b>1</b>	<b>Layanan Keprotokolan</b>				
		a Berkas Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden Keluar Negeri	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Protokol / Perwakilan
		b Pengaturan Acara Kenegaraan dan Berkas Tamu Negara Asing	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Protokol / Perwakilan
		- Fasilitas Kedatangan dan				
		- Pengaturan Tata Tempat				
		- Pengaturan Tata Upacara				
		- Pengaturan Tata Penghormatan				
		c Dukungan Keprotokolan Menteri Luar Negeri RI dan Wakil Menteri Luar Negeri RI di dalam dan di Luar Negeri	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Protokol / Perwakilan
		- Fasilitas Kedatangan dan				
		- Berkas Pengaturan Tata Tempat				
		- Berkas Pengaturan Tata Upacara				
		- Berkas Pengaturan Tata				
		- Berkas Jamuan				
		d Upacara Diplomatik dan Tanda Jasa Kehormatan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Protokol / Perwakilan
		1 Berkas Penyerahan Surat				
		2 Berkas Penganugerahan Tanda				

		e	Pertemuan Internasional dan Kerja Sama Antar Lembaga	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Protokol / Perwakilan
			- Berkas Pengaturan Tata Tempat				
			- Berkas Pengaturan Tata Upacara				
			- Berkas Pengaturan Tata				
	<b>2</b>	<b>Layanan Kekonsuleran</b>					
		a	Layanan Paspor Diplomatik dan Dinas	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Konsuler / Perwakilan
			- Pembuatan dan Penerbitan				
			- Pemberian Izin Ke Luar Negeri				
			- Pengawasan Penggunaan Paspor				
			- Rekomendasi visa Diplomatik				
		b	Layanan Visa Diplomatik dan Dinas	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Konsuler / Perwakilan
			- Permohonan dan Penerbitan Visa				
			- Permohonan dan Penerbitan Visa				
		c	Perizinan Tinggal Diplomatik dan Dinas	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Konsuler / Perwakilan
			- Penerbitan izin Tinggal				
			- Penerbitan <i>Exit Permit Only</i>				
			- Surat Pengantar Pengurusan izin				
			- Surat Pengantar Pengurusan izin				
		d	Perizinan Penerbangan, Pelayaran dan Legalisasi	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Konsuler / Perwakilan
			1 Perizinan Diplomatik Bagi				
			2 Penerbitan <i>Exit Permit Only</i>				
			3 Perizinan Diplomatik Bagi				
			4 Legalisasi Dokumen Asing yang				
		e	Jasa Kekonsuleran Warga Negara Asing	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Konsuler / Perwakilan
			1 Notifikasi Kekonsuleran Warga				
			2 Fasilitasi Akses Kekonsuleran				
			3 Pengelolaan Basis Data Kasus				
			4 Kerja Sama Kekonsuleran				
	<b>3</b>	<b>Fasilitas Diplomatik</b>					

		a	Kendaraan Bermotor	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Fasilitas Diplomatik / Perwakilan
			- Perizinan Fasilitas Kendaraan				
			- Evaluasi Fasilitas Kendaraan				
		b	Perpajakan dan Pengendalian Asas Resiprositas	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Fasilitas Diplomatik / Perwakilan
			- Fasilitas Perpajakan Bagi				
			- Evaluasi Fasilitas Perpajakan				
			- Data Fasilitas Berdasarkan Asas				
		c	Akreditasi dan Fasilitas Kunjungan Daerah	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Fasilitas Diplomatik / Perwakilan
			- Penerbitan Kartu Tanda Pengenal				
			- Perizinan dan Pendampingan				
			- Pemberian Akreditasi Kantor				
		d	Perizinan Bangunan, Senjata Api dan Alat Komunikasi	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Fasilitas Diplomatik / Perwakilan
			- Perizinan dan Pengawasan				
			- Perizinan Penggunaan Pesawat				
		e	Barang Diplomatik dan Pas Bandara	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Fasilitas Diplomatik / Perwakilan
			- Pemasukan dan pengeluaran				
			- Pembuatan Kartu Kendali untuk				
			- Penerbitan Surat Rekomendasi				
		<b>4</b>	<b>Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI)</b>				
		a	Penyelesaian Kasus Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia / Perwakilan
			1 Pelindungan diplomatik dan konsuler				
			2 Bantuan sosial				
			3 Bantuan hukum				
			4 Fasilitas layanan kesehatan dan				
			5 Bantuan penampungan				

		b	Kelembagaan dan Diplomas Perlindungan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia / Perwakilan
			1 Penyusunan Kebijakan dan				
			2 Kerja sama perlindungan WNI				
			3 Pemantauan dan evaluasi				
			4 Pelatihan dan kampanye				
		c	Sistem dan Teknologi Informasi Pelayanan Kekonsuleran dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia / Perwakilan
			1 Kerja sama pemanfaatan sistem				
			2 Laporan Pengelolaan sistem pelayanan konsuleran dan Perlindungan WNI				
		d	Berkas Penghargaan Hassan Wirajuda Perlindungan Award (HWP)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia / Perwakilan
<b>VIII. STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI</b>							
		1	<b>Kebijakan Teknis Rencana dan Program</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
			- Rencana dan Program Strategi Kebijakan				
			- Rencana Kegiatan/Rencana Kerja				
		2	<b>Analisis dan Pemberian Rekomendasi Strategi Kebijakan</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri / Perwakilan
			- izin Pengkajian dan Pengembangan				
			- Data Primer dan Tinjauan Pustaka				
			- Pengolahan Data				
			- Analisis Data				
			- Laporan Hasil Kajian/Pengembangan				
			- Rekomendasi Strategi Kebijakan				
		3	<b>Kerja Sama Kajian</b>				
		a	Berkas Kerja sama kajian dengan Universitas Dalam Negeri dan Luar Negeri	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri / Perwakilan
			- Perjanjian Kerja sama				
			- Hasil Kajian				

		b.	Berkas Kerja sama kajian dengan Lembaga Kajian Dalam Negeri dan Luar Negeri (ICWA) dan Lembaga Internasional	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri / Perwakilan
			- Perjanjian Kerja sama				
			- Hasil Kajian				
		c.	Berkas Kerja Sama Sinkronisasi Data Analisis	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri / Perwakilan
			- Sinkronisasi Data Analisis				
			- Hasil Rekomendasi Strategi Kebijakan dan Isu Khusus				
			- Hasil Penetapan Strategi Kebijakan				
	<b>4</b>		<b>Kertas Kerja Strategi Kebijakan dan Isu Khusus</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri / Perwakilan
	<b>5</b>		<b>Publikasi dan Diseminasi Informasi</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri / Perwakilan
			- Laporan Koordinasi				
			- Laporan Hasil Diseminasi				
			- Debriefing				
	<b>6</b>		<b>Laporan Pemantauan dan Evaluasi</b>	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri / Perwakilan

MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 12 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS  
 KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

PENGAMANAN ARSIP DINAMIS BERDASARKAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS  
 KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

NO	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	MEDIA ARSIP					
		ARSIP KONVENSIONAL			ARSIP ELEKTRONIK		
		ARSIP	PENGGUNA	SARANA PRASARANA	ARSIP	PENGGUNA	SARANA PRASARANA
1	Terbuka/Biasa	Tidak ada persyaratan dan prosedur khusus	Pengguna Internal dan Eksternal yang mempunyai hak akses	a. Lemari arsip ( <i>filling cabinet</i> ) atau rak besi  b. Penggunaan prasarana dan sarana disesuaikan dengan ruangan dan kondisi fisik arsip	1. <i>Back up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin keaslian Arsip  2. Arsip elektronik harus dilindungi terhadap penggunaan internal dan eksternal	Pengguna Internal dan Eksternal yang mempunyai hak akses dari pemilik otoritas sistem	Server dan sistem aplikasi yang memiliki autentifikasi
2	Terbatas	Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap "TERBATAS" pada fisik Arsip	Pengguna Internal yang memiliki hak akses, Pengawas eksternal, dan Aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Diperlukan tempat penyimpanan yang aman	1. <i>Back up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin keaslian Arsip  2. Arsip elektronik harus dilindungi terhadap penggunaan internal dan eksternal	1. Pengguna Internal yang memiliki hak akses  2. Pengawas eksternal dan aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akses dari pemilik otoritas sistem dan dokumen (berdasarkan permohonan)	1. Server dan sistem aplikasi yang memiliki autentifikasi  2. <i>Firewall</i> dan <i>Instruction Prevention System</i> (IPS) 3. Arsip harus terenkripsi dan dekripsi <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC)
3	Rahasia	1. Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap "RAHASIA" pada fisik arsip 2. Tidak sembarangan meletakkan arsip/ dokumen rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Lokasi aman dengan akses terbatas	1. <i>Mirror</i> secara <i>real time</i> untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin keaslian arsip  2. Arsip elektronik harus dilindungi terhadap penggunaan internal dan eksternal	1. Pengguna Internal yang memiliki hak akses  2. Pengawas eksternal dan aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akses dari pemilik otoritas sistem dan dokumen (berdasarkan permohonan)	1. Server dan sistem aplikasi yang memiliki autentifikasi  2. <i>Firewall</i> dan <i>Instruction Prevention System</i> (IPS) 3. Arsip harus terenkripsi dan dekripsi hanya dapat diakses melalui server  4. <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC)
4	Sangat Rahasia	Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap "SANGAT RAHASIA" pada fisik arsip	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan dan penegak hukum	1. Disimpan di zone yang sangat aman dengan penelusuran jejak akses	1. <i>Mirror</i> secara <i>real time</i> untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin keaslian arsip	1. Pengguna Internal yang memiliki hak akses	1. Server dan sistem aplikasi yang memiliki autentifikasi

			2. Penerapan kebijakan "meja harus bersih"	2. Arsip elektronik harus dilindungi terhadap penggunaan internal dan eksternal	2. Pengawas eksternal dan aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akses dari pemilik otoritas sistem dan dokumen (berdasarkan permohonan)	2. <i>Firewall dan Instruction Prevention System (IPS)</i> 3. Arsip harus terenkripsi dan deskripsi hanya dapat diakses melalui server 4. Token ( <i>two factor authentication</i> ) 5. <i>Disaster Recovery Center (DRC)</i>
--	--	--	--	---	---	--

MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI